

Penanaman Nilai Dan Anti Korupsi Di Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Dan Represif Pencegahan Korupsi

Iwan Ridwan Paturochman *¹

Irma Yundari ²

Rahma Juliasari ³

Finadia Lestari ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya ,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia

*e-mail: iwanridwanpaturochman@yahoo.com ¹, irmayundari24028@gmail.com ²,
rahmajuliasari.xirpl1@gmail.com ³, finadialestari18@gmail.com ⁴

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan struktural dan kultural yang terus menghambat pertumbuhan bangsa Indonesia. Penanggulangan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar pengetatan hukum; perlu juga membangun integritas budaya, dimulai dari lingkungan sosial dasar, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis literatur tentang nilai-nilai antikorupsi, peran lingkungan sosial, serta strategi pencegahan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai fondasi bagi pengembangan karakter dan moral anak dengan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian menolak tindakan tidak jujur. Sekolah memperkuat nilai-nilai tersebut melalui kurikulum, budaya sekolah, dan teladan guru, sementara masyarakat berperan sebagai pengawas, menciptakan integritas budaya melalui norma dan kontrol sosial. Strategi preventif seperti reformasi tata kelola pemerintahan, transparansi, digitalisasi layanan publik, dan pendidikan antikorupsi harus diimplementasikan bersamaan dengan strategi represif berupa penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Membangun sistem sosial, pendidikan, dan pemerintahan yang bersih dan terpadu dianggap paling efektif melalui integrasi kedua strategi ini. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan multidimensi untuk mencegah korupsi, yaitu memperkuat nilai, budaya, sistem, dan hukum secara bersamaan.

Kata Kunci: Korupsi; Lingkungan Sosial; Nilai-Nilai Antikorupsi Pencegahan; Pendidikan Karakter; Penegakan Hukum.

Abstract

Corruption is a structural and cultural problem that continues to hamper the growth of the Indonesian nation. Eradicating corruption requires more than simply tightening laws; it also requires building cultural integrity, starting from the basic social environment, such as the family, school, and community. This study used qualitative methods with a library study and a descriptive-analytical approach to analyze literature on anti-corruption values, the role of the social environment, and prevention and decision-making strategies. The results show that families serve as the foundation for children's character and moral development by fostering the values of honesty, responsibility, discipline, and the courage to reject dishonest acts. Schools reinforce these values through the curriculum, school culture, and teacher role models, while the community acts as a watchdog, creating cultural integrity through norms and social control. Preventive strategies such as governance reform, transparency, digitalization of public services, and anti-corruption education must be implemented alongside repressive strategies such as firm and consistent law enforcement. Building a clean and integrated social, educational, and governmental system is considered most effective through the integration of these two strategies. These findings highlight the importance of a multidimensional approach to preventing corruption, namely strengthening values, culture, systems, and laws simultaneously.

Keywords: Anti-Corruption Values; Corruption; Character Education; Law Enforcement; Prevention; Social Environment.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan struktural dan kultural yang terus menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan demokrasi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat kesejahteraan rakyat. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary

crimes), sehingga penanggulangannya membutuhkan tindakan luar biasa yang melampaui sekadar penegakan hukum. Diperlukan pula upaya komprehensif untuk membangun budaya integritas. Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih stagnan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan belum efektif.

Salah satu faktor utama maraknya praktik korupsi adalah lemahnya nilai-nilai moral dan etika yang terdapat di lingkungan sosial, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Masyarakat yang permisif terhadap kecurangan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan cenderung mengembangkan pola pikir yang menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada langkah-langkah hukum formal, tetapi harus menyentuh akar budaya dan menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keberanian, dan disiplin merupakan kunci membangun masyarakat yang berintegritas.

Nilai-nilai ini perlu ditanamkan dalam keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah sebagai lembaga pembentuk karakter, dan masyarakat luas sebagai ruang praktik sosial. Upaya preventif dalam konteks ini meliputi pendidikan antikorupsi, peningkatan literasi integritas, dan penciptaan budaya sosial yang menolak korupsi. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai moral dan budaya integritas. Di sisi lain, tindakan preventif harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan ditegakkan secara adil. Penegakan hukum yang kuat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan elemen penting dalam memutus mata rantai praktik korupsi yang telah mengakar. Namun, tanpa dukungan masyarakat dan lingkungan sosial yang memantau dan menolak perilaku korup, tindakan-tindakan ini tidak akan efektif.

Oleh karena itu, sinergi antara strategi preventif dan represif diperlukan sebagai pendekatan komprehensif yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Isu yang diangkat dalam penelitian/jurnal ini berfokus pada bagaimana lingkungan sosial dapat secara aktif membantu menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan bagaimana kombinasi upaya preventif dan represif dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan menggabungkan studi konseptual, teori pendidikan karakter, dan analisis kebijakan antikorupsi, tulisan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya mengembangkan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian fokus pada analisis literatur yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi, lingkungan sosial, serta strategi pencegahan dan penindasan korupsi. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data langsung seperti observasi atau wawancara.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang artinya penelitian menggambarkan isi dari literatur secara rapi, lalu menganalisis untuk menemukan hubungan antara konsep nilai antikorupsi, peran lingkungan sosial, dan kebijakan pencegahan korupsi.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku ilmiah, jurnal, laporan resmi lembaga seperti KPK dan Transparency International, serta peraturan-peraturan yang relevan.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu memilih literatur yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mencari informasi dari literatur,
2. Mengelompokkan informasi berdasarkan tema,
3. Mereduksi data untuk memilih informasi yang penting,
4. Melakukan analisis isi untuk memahami makna dari informasi yang ditemukan, dan
5. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Dengan metode ini, penelitian mampu menjelaskan secara mendalam peran penanaman nilai antikorupsi dalam lingkungan sosial sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindasan korupsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman nilai antikorupsi di lingkungan keluarga merupakan hasil penting dari penelitian yang dilakukan. Keluarga adalah salah satu agen utama dalam membentuk karakter seseorang. Menurut Lickona (1991), nilai moral seseorang berkembang melalui contoh dan kebiasaan yang diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa peduli harus ditanamkan sejak dini melalui interaksi sehari-hari. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang konsisten menerapkan aturan, mendorong komunikasi terbuka, dan menolak segala bentuk kecurangan akan membentuk anak yang memiliki integritas. Sebaliknya, keluarga yang terlalu memperbolehkan kebohongan kecil atau tindakan tidak jujur justru memungkinkan munculnya perilaku korup di masa depan (Hidayat, 2017; Sulistiyan, 2018).

Selain keluarga, lembaga pendidikan juga berperan penting dalam memperkuat nilai antikorupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) telah mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan di sekolah. Nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui budaya sekolah yang mendorong integritas, seperti budaya antre, transparansi nilai, serta disiplin. Guru sebagai figur yang dapat ditiru memiliki pengaruh besar dalam proses ini. Contoh yang diberikan guru lebih efektif dibandingkan hanya menjelaskan teori (Sagala, 2013; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015). Dengan demikian, sekolah berfungsi sebagai agen pencegahan yang membentuk generasi muda agar memiliki karakter kuat dan tidak mudah terlibat dalam korupsi.

Lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam membentuk budaya antikorupsi. Pranoto (2015) menyatakan bahwa budaya yang memperbolehkan praktik seperti pungutan liar, gratifikasi, dan nepotisme justru memperkuat korupsi di tingkat sosial. Masyarakat dapat menjadi pengawas melalui kampanye, laporan dugaan pelanggaran, serta peran tokoh masyarakat dalam membangun nilai integritas bersama (Mustopadidjaja, 2016). Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan, semakin rendah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini menegaskan peran penting masyarakat dalam mencegah korupsi sekaligus memperbaikinya.

Berdasarkan kebijakan yang ada, strategi pencegahan menjadi pilar utama dalam mencegah korupsi di Indonesia. KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) mendorong reformasi birokrasi, transparansi di layanan publik, digitalisasi administrasi, dan pendidikan antikorupsi untuk mencegah tindakan korupsi sejak awal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015). Dalam konteks pelayanan publik, strategi pencegahan dianggap lebih efektif karena memperbaiki sistem sebelum terjadi penyimpangan. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan prosedur adalah hal utama yang mampu mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun demikian, strategi represif tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan agar dapat menciptakan efek jera (UU PTPK, 2001). Dari hasil analisis kepustakaan terlihat bahwa tindakan represif membantu meningkatkan risiko bagi pelaku korupsi, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta memastikan bahwa korupsi tidak dibiarkan terus berlangsung. Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang optimal. Tambunan (2019) menekankan bahwa pentingnya menggabungkan kedua pendekatan tersebut agar bisa menangani korupsi secara menyeluruh.

Hasil analisis deskriptif-analitis menunjukkan bahwa penggabungan strategi preventif dan represif merupakan model pencegahan korupsi yang paling efektif. Pendekatan preventif

berperan dalam memperkuat nilai integritas dan memperbaiki sistem tata kelola, sedangkan strategi represif berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi kembali. Model ini diwujudkan dalam kebijakan Stranas-PK serta laporan KPK yang menekankan bahwa reformasi birokrasi, partisipasi masyarakat, pendidikan antikorupsi, dan penegakan hukum harus dilakukan secara bersamaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Secara keseluruhan, penggabungan ini berhasil memperkuat ketahanan sosial terhadap praktik korupsi serta membantu menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk penyimpangan (Transparency International, 2019).

KESIMPULAN

Tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis menunjukkan bahwa pencegahan korupsi merupakan proses yang kompleks dan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Keluarga merupakan fondasi pembentukan karakter dan integritas anak karena melalui interaksi sehari-hari, anak mempelajari nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan penolakan terhadap perilaku tidak jujur. Jika nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten, individu akan memiliki kekuatan moral untuk menolak korupsi saat dewasa. Sebaliknya, jika keluarga terlalu lunak terhadap perilaku tidak jujur, hal tersebut dapat menjadi awal mula perilaku menyimpang. Oleh karena itu, keluarga dapat dianggap sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi secara preventif. Lebih lanjut, lembaga pendidikan berperan dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi melalui kurikulum, budaya sekolah, kebiasaan belajar, dan teladan para pendidik. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat menumbuhkan sikap berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan guru, evaluasi yang transparan, kegiatan organisasi siswa, dan budaya sekolah yang jujur dan disiplin merupakan perangkat penting dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi yang terstruktur membantu memperkuat nilai-nilai yang telah tertanam dalam keluarga, sehingga menghasilkan generasi yang kritis terhadap bahaya korupsi.

Lingkungan masyarakat kemudian menjadi tempat di mana individu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai kejujuran atau budaya yang memungkinkan perilaku menyimpang. Masyarakat dengan norma yang kuat, menghargai transparansi, dan menolak praktik-praktik seperti suap, pungutan liar, atau nepotisme akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai antikorupsi. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial melalui pelaporan, partisipasi publik, kampanye integritas, dan peran tokoh Masyarakat merupakan faktor krusial dalam pencegahan korupsi. Budaya integritas dalam masyarakat menjadi lapisan sosial yang memperkuat pembentukan karakter dalam keluarga dan sekolah. Di sisi lain, analisis penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi lebih dari sekadar menumbuhkan karakter dan norma. Diperlukan strategi pencegahan kelembagaan, seperti perbaikan tata kelola, penguatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, digitalisasi layanan publik, dan implementasi reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan perizinan, sehingga meminimalkan risiko korupsi struktural dan jangka panjang.

Namun, strategi pencegahan tidak akan berhasil tanpa dukungan penegakan hukum yang kuat, konsisten, dan tanpa intervensi. Penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana, memainkan peran krusial dalam menyadarkan pelaku tindak pidana atas kesalahannya dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pengawasan. Efek jera ini krusial karena membantu masyarakat memahami konsekuensi serius korupsi dan mendorong mereka yang berpotensi terlibat korupsi untuk menghindari perilaku tersebut. Kombinasi strategi pencegahan dan penegakan hukum merupakan pendekatan yang paling efektif dan komprehensif untuk mencegah korupsi.

Strategi pencegahan membangun sistem dan budaya jujur sejak awal, sementara strategi penegakan hukum memastikan semua pelanggaran mendapatkan sanksi. Kedua strategi ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial, pendidikan, dan pemerintahan yang suportif guna mengurangi peluang korupsi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dipahami sebagai proses yang melibatkan penguatan nilai, budaya, sistem, dan hukum secara simultan, sehingga tercipta masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25, 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Program Studi Teknik Informatika*, 5(2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (t.t.). Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools. In I. K. N. P. J. R. & R. S. M. V. K. M. A. A. (Eds.), *Proceedings of the Second International Conference on Communication, Computing and Networking* (t.t. hlm.). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13>